



Kebijakan bisnis dan hak asasi manusia

Mei 2020

Daftar Isi

1. Pendahuluan	2
2. Komitmen	2
3. Perwujudan	3
4. Tata Kelola	4

1. Pendahuluan



Tujuan bp adalah menata kembali energi bagi umat manusia dan planet kita. Ini berarti lebih dari sekadar menghasilkan energi yang dibutuhkan dunia. Ini berarti melakukannya dengan cara yang dapat meningkatkan taraf hidup semua orang. Bagi masyarakat di mana kami tinggal dan bekerja, serta bagi semua orang yang bekerja untuk dan bersama kami.

Kami membuat pilihan yang berdampak pada semua orang sepanjang waktu. Keputusan tentang wilayah operasi kami, hal yang kami lakukan, dan cara kami melakukannya. Dan kami menetapkan standar bagi diri kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami dapat membuat kesalahan, namun kebijakan hak asasi manusia kami, serta kode etik kami, menuntut kami untuk memiliki cita-cita tinggi. Dan dengan bersikap terbuka tentang hal yang kami harapkan danwajibkan dari karyawan bp, kami berharap untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kami percaya – di mana pun kami menjalankan bisnis – kami harus melakukannya secara bertanggung jawab, dengan menghormati hak-hak tenaga kerja dan lingkungan kami. Itulah hal yang patut dilakukan dan menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan kami. Kita tidak boleh pasrah pada standar yang sekadarnya.”

Bernard Looney

Chief executive officer

Hak asasi manusia berkaitan dengan kegiatan kami melalui banyak cara, termasuk dampak terhadap mata pencaharian masyarakat, akses untuk mendapatkan air, tanah dan sumber daya, hak tenaga kerja – termasuk perbudakan modern, serta tindakan pasukan keamanan yang melindungi situs kami. Tindakan dan operasi kami juga dapat menghadirkan manfaat dan peningkatan yang signifikan bagi individu, komunitas, dan masyarakat.

Kami ingin berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan dan bekerja keras mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kami juga mengakui pentingnya transisi yang adil seperti yang tercantum dalam Perjanjian Paris – transisi yang memberikan pekerjaan yang layak, berkualitas, dan mendukung mata pencaharian masyarakat setempat. Kami

bertekad untuk secara aktif mendukung kebijakan yang mendukung emisi ‘net zero’. Ini termasuk mendorong penggunaan keuangan dan pendapatan dari penetapan harga karbon untuk mendukung transisi yang adil.

Demi mewujudkan tujuan kami, kami harus terus bekerja dengan memenuhi standar yang konsisten dan tinggi di mana pun kami beroperasi. Akan ada saatnya kami melakukan kesalahan, dan kami akan membutuhkan dukungan dan kritik dari pihak lain untuk membantu kami membuat perbedaan yang positif dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

2. Komitmen

2.1. Kami menjalankan bisnis dengan menghormati hak dan martabat semua orang, serta mematuhi semua persyaratan hukum.

2.2. Kami menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights) dan standar tenaga kerja yang diakui oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization atau ILO), sebagaimana tercantum dalam Pernyataan ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja.

2.3. Dalam memenuhi tanggung jawab kami untuk menghormati hak asasi manusia, kami mempertimbangkan standar hak asasi manusia internasional yang relevan, termasuk instrumen PBB yang menetapkan atau menjelaskan hak kelompok tertentu. Kami menghormati hak individu yang berasal dari kelompok atau populasi yang mungkin sangat rentan terhadap dampak merugikan, termasuk: masyarakat adat; perempuan; kelompok bangsa atau etnis, pemeluk agama dan penutur bahasa minoritas, anak-anak; LGBT+, penyandang disabilitas; dan tenaga kerja migran serta keluarganya.

2.4. Kami mengakui tanggung jawab kami untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGP) dan ditegaskan kembali dalam bab hak asasi manusia Panduan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD) untuk Perusahaan Multinasional.

2.5. Sejalan dengan komitmen kami untuk menghormati standar tenaga kerja inti ILO, kami menghormati kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Kami mendukung pemberantasan semua bentuk tenaga kerja paksa atau wajib, pekerja di bawah umur, dan diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan.

2.6. Kami memperlakukan semua karyawan yang bekerja untuk bp secara adil dan tanpa diskriminasi. Karyawan, staf agen, dan pemasok kami berhak untuk bekerja di lingkungan dan dalam kondisi yang menghormati hak serta martabat mereka.

2.7. Kami akan mematuhi undang-undang dalam negeri yang berlaku mengenai kebebasan hak bagi pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat buruh atau untuk berunding bersama, serta hak mereka untuk tidak melakukannya. Apabila karyawan kami ingin diwakili oleh serikat buruh atau dewan kerja, kami akan bekerja sama dengan iktikad baik bersama badan yang secara bersama-sama dipilih oleh karyawan kami untuk mewakili mereka. Dalam situasi saat kebebasan berserikat dibatasi atau dilarang oleh hukum, kami akan menerima dan mendukung sarana alternatif dari perwakilan dan keterlibatan pekerja.

2.8. Kami menghormati hak asasi manusia di masyarakat yang mungkin terdampak oleh kegiatan kami.

2.9. Kami mendukung Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan Hak Asasi Manusia (Prinsip Sukarela) serta berkomitmen untuk menerapkannya sebagai standar global guna menjamin keamanan yang bertanggung jawab dalam industri kami.

2.10. Kami berupaya membuat perjanjian kontrak dengan pemasok kami yang mewajibkan mereka untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam pekerjaan mereka untuk bp, sesuai dengan komitmen dalam kebijakan ini, berdasarkan sifat pekerjaan mereka untuk kami. Kami memiliki klausul kontrak standar untuk mendukung hal ini

3. Pencapaian

3.1. Kami akan memenuhi tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia dengan menerapkan UNGP dan memasukan prinsip-prinsip ini ke dalam proses, kebijakan, atau panduan internal yang mendukung kegiatan bisnis kami. Ini termasuk: pelatihan; pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia – sebagaimana dijelaskan dalam UNGP – melalui proses-proses manajemen risiko dan dampak kami; serta manajemen pengaduan. Dengan melakukannya, kami bertekad menjalankan bisnis untuk mengidentifikasi potensi dampak terkait hak individu di masyarakat setempat dan pekerja yang terdampak oleh kegiatan kami.

3.2. Kode etik kami dan harapan pemasok memperkuat dan mendukung komitmen kami untuk menghormati hak asasi manusia.

3.2.1. Harapan kami terhadap para pemasok berperan sebagai alat untuk menyampaikan harapan dalam kode etik ini – dan harapan bahwa mitra bisnis kami harus menghormati hak asasi manusia dan memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam UNGP – kepada pemasok, vendor, dan penyedia layanan kami, seperti tenaga kerja sementara.

Pemasok juga diharapkan untuk menyampaikan harapan ini kepada karyawan, pemasok, dan mitra bisnis mereka, yang menyediakan barang atau layanan kepada kami.

i Baca selengkapnya di bp.com/supplierexpectations

3.2.2 Hak tenaga kerja dan prinsip-prinsip perbudakan modern kami menegaskan kembali bahwa kami berharap kontraktor, pemasok, dan joint venture atau JV kami untuk menghormati hak pekerja, sejalan dengan Konvensi Inti ILO mengenai Hak di Tempat Kerja. Kami menetapkan 13 prinsip untuk membantu bisnis, kontraktor, dan pemasok kami saat mereka berupaya untuk memastikan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan ini.

i Baca selengkapnya di bp.com/modernslavery

3.3. Hak tenaga kerja kami

Penghormatan terhadap hak asasi karyawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses-proses perekrutan, manajemen, keanekaragaman dan penyertaan kami. Kami memberikan panduan bagi bisnis dan proyek kami dalam menghormati hak-hak pekerja dan menyaring proyek-proyek utama kami pada tahap pengembangan, termasuk sehubungan dengan hak tenaga kerja, demi mengidentifikasi dan mencegah potensi dampak.

3.4. Hak asasi manusia dan masyarakat

Ketika orang-orang di masyarakat lokal akan terkena dampak oleh kegiatan kami, kami berupaya untuk mengidentifikasi dampak hak asasi manusia yang merugikan serta mengambil langkah yang sesuai untuk mencegah, meminimalkan, dan/atau menanggulangi. Untuk mendukung hal ini, kami memberikan panduan bagi bisnis dan proyek kami mengenai keterlibatan dengan pemangku kepentingan setempat, serta pengelolaan proses penerimaan dan tanggapan terhadap keluhan dari masyarakat.

3.4.1. Air

Kami menghormati hak atas air dan sanitasi bagi orang-orang yang berpotensi terdampak oleh kegiatan kami, termasuk karyawan, kontraktor, dan masyarakat di sekitar kami. Ketersediaan air di wilayah kerja kami sangat bervariasi, sehingga kami mempertimbangkan kondisi setempat, seperti kekurangan dan kelangkaan air, untuk memahami dan menanggulangi dampak yang kami timbulkan. Pertama-tama, kami berupaya menghindari segala dampak dan, jika tidak memungkinkan, kami menerapkan tindakan penanggulangan untuk mengatasi dampak tersebut. Kami meninjau risiko air pada portofolio kami setiap tahun, dengan mempertimbangkan ketersediaan, jumlah, kualitas, dan persyaratan regulasi setempat.

3.4.2. Pendekatan kami terhadap relokasi masyarakat

Kami menghindari relokasi masyarakat dan/atau individu diluar kemauan sendiri, tetapi jika ini tidak memungkinkan, kami dapat mengakses atau mengakuisisi lahan untuk aktivitas operasi kami berdasarkan panduan yang telah selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Standar Kinerja Korporasi Keuangan Internasional (International Finance Corporation atau IFC)5.

3.4.3. Hak masyarakat asli

Kami menghormati hak masyarakat asli (indigenous people atau IP) dan, jika mereka akan terdampak oleh kegiatan-kegiatan bisnis kami, pendekatan dan tindakan-tindakan kami bertujuan agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang

Kode etik kami mendukung komitmen kami untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk menetapkan:

Harapan kami terhadap keanekaragaman dan penyertaan, kesempatan yang sama, dan kebebasan dari kekerasan atau pelecehan di tempat kerja. Kami ingin menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bebas dari pelecehan, intimidasi, perlakuan yang tidak manusiawi, dan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, orientasi seksual, identitas gender, status perkawinan, disabilitas, atau karakteristik lain yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Kami tidak menoleransi pembalasan, yang meliputi ancaman, intimidasi, pengecualian, penghinaan, dan mengangkat isu-isu dengan niat jahat atau itikad buruk.

Kami ingin bekerja sama dengan mitra bisnis yang berbagikomitmen dengan kita dalam hal keselamatan, etika, serta kepatuhan, dan kami dengan jelas menyampaikan harapan pemasok dan mitra bisnis, menyepakati kewajiban-kewajiban kontraktual yang tepat. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat ketika mereka tidak memenuhi harapan-harapan atau kewajiban-kewajiban tersebut. Ini termasuk menyampaikan kebijakan hak asasi manusia dan harapan-harapan kami mengenai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana mestinya.

i Baca selengkapnya di bp.com/codeofconduct

ditetapkan dalam standar internasional terkait konsultasi dan keterlibatan dengan masyarakat asli, termasuk Konvensi ILO Mengenai Masyarakat Hukum Adat (ILO169), Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous People atau UNDRIP). Panduan kami merujuk Standar Kinerja IFC 7 dan mengakui pentingnya melakukan identifikasi dan berkonsultasi dengan masyarakat asli, dengan berupaya menerapkan prinsip-prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) jika memungkinkan, idealnya sebelum kegiatan berlangsung.

3.5. Penilaian dampak hak asasi manusia

3.5.1. Kami berupaya untuk menanamkan hak asasi manusia ke dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial, atau melakukan penilaian independen terhadap potensi dampak yang merugikan hak asasi manusia, apabila dirasa sesuai. Dalam mengidentifikasi, menilai, dan menangani dampak hak asasi manusia dari operasi dan hubungan kami, kami akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkena dampak.

3.5.2. Kami akan memperoleh penilaian pihak ketiga independen atas lokasi dan kegiatan bisnis yang dipilih berdasarkan prioritas risiko untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan ini.

3.5.3. Kami melakukan penilaian risiko perbudakan modern dan perdagangan manusia untuk kegiatan bisnis kami serta sejumlah kegiatan kontraktor dan pemasok kami, dengan memusatkan upaya pada hal yang kami yakini berisiko lebih tinggi terhadap hak tenaga kerja kami. Berdasarkan hal ini, kami menerapkan proses uji tuntas hak tenaga kerja kepada pemasok dan, jika diwajibkan oleh kriteria berdasarkan risiko, melakukan penilaian di tempat.

3.5.4. Semua lokasi operasi wajib melakukan penilaian risiko keamanan, yang mempertimbangkan risiko hak asasi manusia terkait keamanan, dan mengembangkan rencana kerja, yang sejalan dengan Prinsip Sukarela, untuk menangani segala hal yang teridentifikasi.

3.6. Mekanisme keluhan dan remediasi

3.6.1. Kami berupaya menyediakan mekanisme keluhan bagi tenaga kerja dan masyarakat lokal. Kami tidak menghalangi akses ke proses peradilan berbasis nasional. Kami tidak mewajibkan seseorang atau masyarakat secara permanen mengesampingkan hak hukum mereka untuk mengajukan klaim melalui proses peradilan sebagai prasyarat untuk mengajukan keluhan melalui mekanisme keluhan bp. Saluran bantuan global rahasia dan anonim kami, OpenTalk, tersedia bagi karyawan, pekerja yang dipekerjakan oleh kontraktor atau pemasok kami, serta pihak ketiga lain, termasuk masyarakat.

3.6.2. Sejalan dengan kebijakan ini dan persyaratan kode etik kami, mekanisme keluhan kami meliputi pencatatan dan pelaporan keluhan yang diajukan, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan tindakan-tindakan yang diambil untuk menangannya.

3.6.3. Apabila bp mengidentifikasi bahwa kami telah menyebabkan atau memberikan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia pihak lain, kami menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi dampak merugikan tersebut melalui proses sah yang bertujuan untuk memberikan pemulihan efektif, tanpa mencegah akses ke bentuk-bentuk pemulihan lain jika dapat dibenarkan. Hal ini meliputi kerja sama dengan itikad baik dalam menyediakan pemulihan melalui mekanisme yang diprakarsai negara, seperti kontak dengan nasional OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development). Apabila dampak merugikan berkaitan langsung dengan kegiatan kami melalui hubungan bisnis kami, kami akan mendukung mitra bisnis dalam remediasi dampak tersebut melalui proses manajemen keluhan mereka sendiri, atau mendukung kerja sama untuk memberikan remediasi non-peradilan melalui pihak ketiga.

3.7. Sebagai bisnis global dan investor jangka panjang, kami menghargai masyarakat yang terbuka, yang ditandai dengan aturan hukum, tata kelola yang baik, dan menghormati kebebasan sipil. Sehubungan dengan kegiatan kami, kami tidak akan mentoleransi atau berkontribusi terhadap serangan, atau ancaman fisik atau hukum, terhadap pihak yang secara aman dan sah melaksanakan hak asasi mereka atas kebebasan berekspresi, protes atau perkumpulan yang damai, termasuk jika mereka bertindak sebagai pembela HAM (human right defender atau HRD), atau terhadap pekerja yang berupaya melaksanakan hak mereka untuk berserikat. Kami menghormati hak asasi manusia pembela HAM dan mengakui peran penting yang dapat dilakukan dalam memajukan pemenuhan hak asasi manusia yang diakui secara universal di masyarakat di mana kami beroperasi. Ketika kami percaya bahwa memang akan menguntungkan, kami dapat memilih untuk melakukannya dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain dan, sesuai dengan pengaruh yang ada pada kami, untuk membantu pembela HAM dalam pelaksanaan HAM tersebut.

4. Tata Kelola

4.1. Kebijakan ini berlaku untuk setiap karyawan dan pejabat di setiap entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh bp dan Joint Venture yang dioperasikan oleh bp.

4.2. Kami mengetahui bahwa, melalui pelaksanaan kegiatan mereka, mitra bisnis kami – termasuk Joint Venture yang tidak dioperasikan, kontraktor dan pemasok – dapat berdampak merugikan secara langsung terhadap hak asasi manusia. Dengan alasan ini, kami ingin bekerja sama dengan mitra bisnis yang berbagi komitmen terhadap hak asasi manusia, keselamatan, etika, dan kepatuhan dengan kami, dan kami berupaya untuk menggunakan pengaruh yang ada pada kami, sejalan dengan UNGP, untuk mendorong mereka bertindak sesuai dengan prinsip yang mendasari komitmen yang ditetapkan dalam kebijakan ini.

4.3. Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk pengelolaan isu mengenai hak asasi manusia berlaku di seluruh bp. Ini termasuk komite keselamatan, lingkungan, dan jaminan keamanan di tingkat dewan yang bertugas

3.8. Bekerjasama dan inisiatif multi-pemangku kepentingan

3.8.1 Kami berpartisipasi dalam prakarsa internasional yang dimaksudkan untuk mendukung hak asasi manusia, termasuk: Global Compact PBB; the Extractive Industries Transparency Initiative, serta Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Kami akan terus mengambil peran membangun dan progresif dalam inisiatif multi-pemangku kepentingan terkait hak asasi manusia dan meyakini bahwa upaya multi-pemangku kepentingan tersebut adalah cara yang efektif untuk menggalakkan standar yang wajar bagi praktik hak asasi manusia pada tingkat operasional.

3.8.2. Kami mendukung dan menerapkan Prinsip-Prinsip Sukarela sebagai kerangka uji tuntas operasional dan manajemen risiko terkait keamanan bagi hak asasi manusia di masyarakat sekitar lokasi kami. Prinsip-Prinsip Sukarela menjadi acuan kami dalam bekerja dengan pasukan keamanan publik dan swasta yang melindungi fasilitas kami, demi mengukuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Kami juga memberikan panduan dan pelatihan kepada bisnis-bisnis kami tentang penerapan Prinsip-prinsip tersebut.

3.9. Kami akan memastikan komunikasi kami dengan pemerintah, lembaga regulasi, dan otoritas publik sejalan dengan komitmen hak asasi manusia kami, sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan ini.

3.10. Sejalan dengan UNGP, apabila terdapat perbedaan antara persyaratan hukum dan kebijakan ini, kami berupaya menerapkan standar yang lebih tinggi, sekaligus mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku. Kami tidak mengikuti segala kebiasaan yang akan melanggar kode etik kami.

mengawasi hak asasi manusia, termasuk peninjauan kinerja kami dalam mengelola risiko perbudakan modern. Pada tingkat manajemen eksekutif, grup komite risiko operasional meninjau kemajuan pelaksanaan hak asasi manusia. Grup kerja hak asasi manusia, yang terdiri atas perwakilan senior dari seluruh bisnis, mempertimbangkan risiko hak asasi manusia saat ini dan yang sedang berkembang sehubungan dengan signifikansi kelompok potensial. Terakhir, fungsi-fungsi bisnis dan operasi lokal bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan guna membantu memenuhi komitmen dalam kebijakan ini dan semua persyaratan grup terkait.

4.4. Kami melaporkan penerapan kebijakan ini setiap tahun kepada para pemangku kepentingan dalam sejumlah pengungkapan yang relevan, termasuk laporan keberlanjutan, pernyataan perbudakan dan perdagangan manusia, serta laporan tahunan tentang penerapan Prinsip-prinsip Sukarela.

i Baca selengkapnya di bp.com/humanrights dan bp.com/reportingcentre

a Untuk tujuan kebijakan ini, kami menganggap pembela hak asasi manusia (HRD) adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja dengan itikad baik yang menggalakkan atau melindungi hak asasi manusia yang diakui secara universal secara lokal, regional, atau internasional.